

# Studi Terpercaya

## Melacak perkembangan keberlanjutan yurisdiksi: Mencapai daftar pendek indikator-indikator utama

*Briefing* disampaikan kepada Komite Penasihat Terpercaya untuk dibahas

Ini merupakan *briefing* ketiga dari rangkaian *briefing* yang dipublikasikan dalam kerangka studi Terpercaya tentang 'melacak kelapa sawit berkelanjutan dan mendefinisikan keberlanjutan yurisdiksi sesuai skala', yang diluncurkan pada April 2018.<sup>1</sup> Penelitian ini dilaksanakan oleh INOBU dan European Forest Institute, dengan masukan berkala dari Komite Penasihat yang diketuai bersama oleh Delegasi Uni Eropa di Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

## Latar Belakang

Tujuan Terpercaya adalah membantu kabupaten dan provinsi di Indonesia untuk mendapatkan pasar yang lebih baik berkat pengakuan atas upaya mereka berubah ke arah produksi komoditas berkelanjutan dari yurisdiksi mereka. Studi ini berupaya untuk menyediakan yurisdiksi dan kelompok petani kecil agar bergabung dalam jalur yang semakin dipandang pasar komoditas, khususnya pada sektor kelapa sawit.

Demi mencapai tujuan, Terpercaya akan mengilustrasikan sistem yang mampu melacak perkembangan yurisdiksi:

- Mengidentifikasi dan memberi penghargaan pada praktik-praktik terbaik di kabupaten yang terdepan
- Menarik kabupaten-kabupaten yang kurang siap untuk mampu menampilkan peningkatan dalam prosesnya, meskipun posisi mereka masih perlu waktu bertahun-tahun untuk mencapai target ambisius dalam mewujudkan keberlanjutan yurisdiksi atau sertifikasi yurisdiksi (lihat angka-angka di bawah ini)

Dalam proses ini, Terpercaya berupaya menyumbang dalam debat yang lebih luas di Indonesia untuk klarifikasi definisi 'keberlanjutan yurisdiksi' dan mengidentifikasi pendekatan yurisdiksi pragmatis yang dapat direplikasi.

Komite Penasihat Terpercaya membahas relevansi identifikasi 'Indikator Kinerja Utama' (IKU atau KPI) yang dapat melacak perkembangan menuju keberlanjutan di tingkat kabupaten dan provinsi<sup>2</sup>. Agar pelaku pasar dapat memanfaatkan informasi ini, KPI harus dapat digunakan di seluruh Indonesia, mencakup hampir seluruh kabupaten di Indonesia. Selain itu, pembaharuan harus rutin dilakukan, setidaknya setiap tahun. Selanjutnya, mengingat peran penting dan tak tergantikan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pengembangan pendekatan yurisdiksi, IKU tersebut perlu dibangun berdasarkan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, serta pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Tinjauan mendalam tentang perundang-undangan dan peraturan Indonesia yang terkait, serta TPB yang relevan diselesaikan dan disajikan dalam Terpercaya Briefing 2.<sup>3</sup> *Briefing* ini berfungsi sebagai landasan untuk mengidentifikasi indikator yang paling mencerminkan amanat dan kompetensi pemerintah daerah yang ada.<sup>4</sup> Konsultasi meja bundar awal pemangku kepentingan dilakukan antara November 2018 dan Januari 2019 untuk mengidentifikasi indikator yang paling relevan dan menciptakan daftar usulan untuk diskusi yang lebih mendalam.

Perkebunan kelapa sawit ►  
di Jambi  
Foto: Jenny Farmer,  
CIFOR



## Komite Penasihat Terpercaya

Membangun konsensus untuk indikator yang mengukur keberlanjutan yurisdiksi di Indonesia adalah tantangan besar. Hal ini termasuk mengidentifikasi, tidak hanya apa yang seharusnya diukur tetapi juga apa yang dapat diukur, mengingat perundang-undangan dan peraturan yang ada, serta mekanisme untuk mengumpulkan data yang relevan. Indikatornya juga perlu relevan dengan beragam pelaku: pemerintah, perusahaan produsen dan pembelian, dan organisasi masyarakat sipil, termasuk petani dan masyarakat adat. Untuk memastikan bahwa indikator mencerminkan kepentingan dan aspirasi berbagai kelompok dan dapat secara efektif digunakan, Komite Penasihat multi-pemangku kepentingan dibentuk. Komite ini mewakili aktor utama yang berkepentingan terhadap produksi komoditas berkelanjutan. Sesi-sesi Komite Penasihat Terpercaya umumnya diketuai bersama dengan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Keberlanjutan yurisdiksi membutuhkan pengembangan kewenangan pemerintah daerah. Untuk memahami ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah, hambatan mereka, dan bagaimana ini sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional, penelitian ini telah melibatkan berbagai kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Pertanian terwakili dalam Komite Penasihat. Perspektif pemerintah daerah terutama hadir melalui Lingkar Temu Kabupaten Lestari.

Perusahaan produsen dan pembelian juga memiliki perwakilan di Komite Penasihat.<sup>5</sup> Terdapat pula perwakilan organisasi masyarakat sipil yang mewakili masyarakat adat dan petani, khususnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) juga berpartisipasi dalam pertemuan Komite Penasihat untuk memastikan keselarasan prinsip, kriteria, dan standar. Selain itu, lembaga swadaya masyarakat, seperti Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan lembaga swadaya masyarakat internasional, seperti World Resources Institute dan Sustainable Trade Initiative (IDH), juga terwakili.

## Indikator untuk melacak perkembangan

Secara global, sertifikasi yurisdiksi daerah sesuai dengan prinsip dan kriteria skema sertifikasi komoditas masih dalam tahap percontohan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, selama konsultasi dan diskusi, pemangku kepentingan diminta untuk lebih menghargai perkembangan menuju keberlanjutan yurisdiksi, bukan hanya pencapaiannya. Hal ini mengarah pada definisi tiga level perkembangan, yang harus dihubungkan oleh semua indikator Terpercaya.<sup>7</sup> Level-level ini menghindari penilaian biner (ya/tidak), bahkan yang terkait dengan aspek tata kelola yang paling sulit untuk diukur secara bertahap.

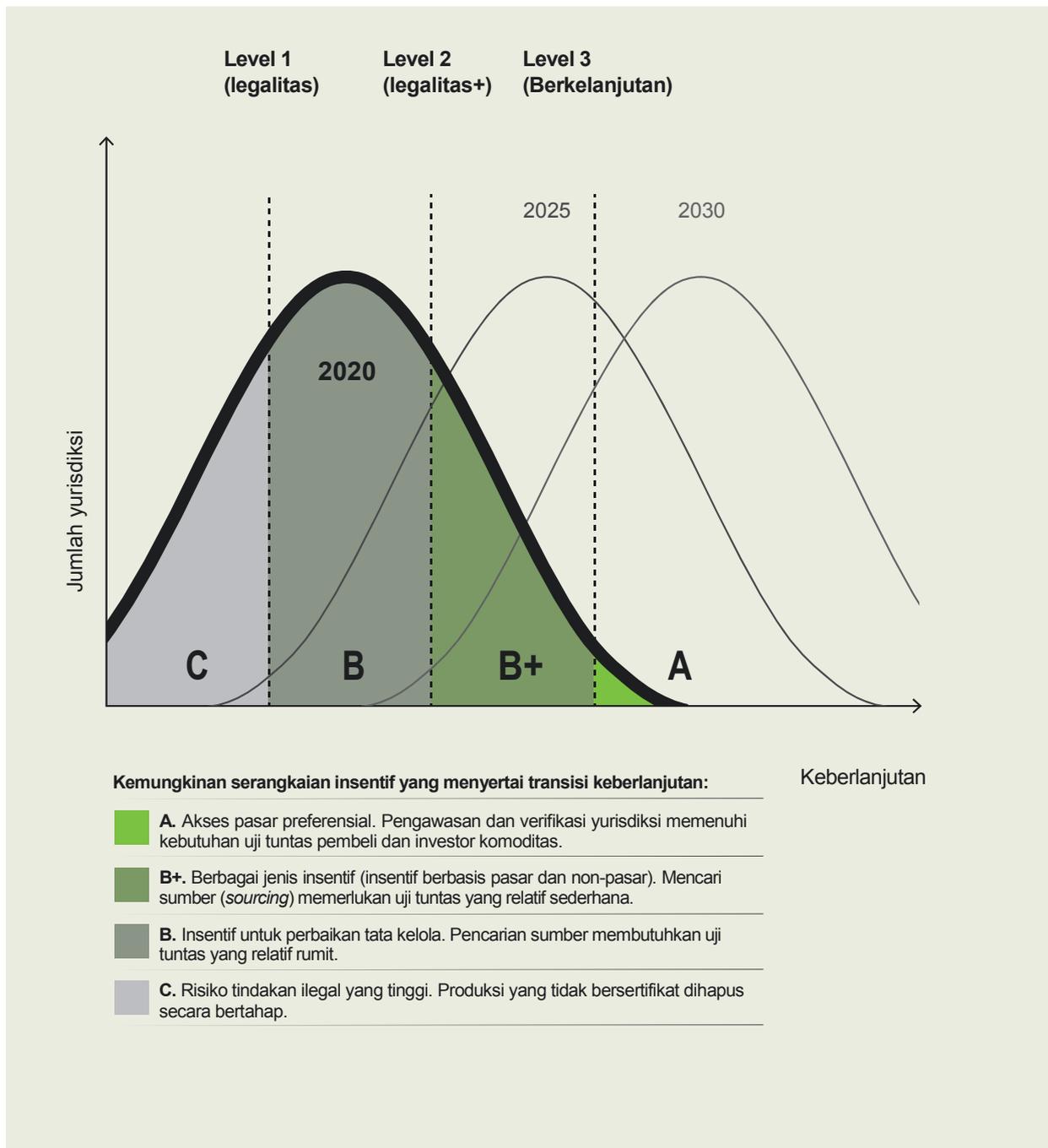
- **Level 1** sesuai dengan legalitas dasar. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan perundang-undangan terkait tata guna lahan dan produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif.
- **Level 2** untuk sementara bernama "legalitas +". Pemerintah daerah mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, telah menyelesaikan perencanaan tata ruang, dan telah mengadopsi peraturan, alat atau proses pendukung untuk menjembatani kesenjangan yang diidentifikasi menuju keberlanjutan dalam jangka pendek atau menengah (misalnya lima tahun).
- **Level 3** akan menjadi yang paling mendekati keberlanjutan dan sesuai dengan praktik terbaik dan kemajuan yang jelas menuju hasil keberlanjutan yang dapat diamati.



Pemupukan tanah di sebuah perkebunan kelapa sawit ▶

Foto: Icaro Cooke Vieira, CIFOR

Gambar di bawah ini menunjukkan kemungkinan distribusi yurisdiksi daerah di sepanjang aksis perkembangan menuju keberlanjutan. Diharapkan bahwa mayoritas akan berada di sekitar level 1 (legalitas dasar) dan 2 (level menengah), dengan lebih sedikit kabupaten yang terdistribusi di level ekstrem (sepenuhnya legal dan sepenuhnya berkelanjutan). Nilai dari penilaian tersebut, dengan pembaruan berkala, digunakan untuk memandu pemberian insentif khusus demi mendorong perkembangan lebih lanjut. Seiring waktu bergulir, jika insentif cukup nyata, distribusi yurisdiksi daerah dapat bergeser ke tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi (lihat kurva ilustrasi 2025 dan 2030 dalam gambar di bawah).



Gambar: Jalur yurisdiksi menuju keberlanjutan

Lampiran pada *briefing* ini menyajikan draft daftar pendek (*shortlist*) awal dari 19 indikator keberlanjutan yurisdiksi. Lampiran ini adalah dokumen hidup yang akan ditinjau dan dibahas lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan.

Pentingnya mempertimbangkan kebutuhan spesifik petani kecil telah diangkat dalam semua diskusi Terpercaya. Hal ini mencerminkan prioritas Pemerintah Indonesia secara umum, dan penguatan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia) pada khususnya. Pada prinsipnya, memberi visibilitas dan pengakuan yang lebih tinggi terhadap kabupaten dan provinsi di pasar komoditas akan menguntungkan petani kecil. Dengan kata lain, pendekatan yurisdiksi dapat dipandang sebagai cara mencapai 'sertifikasi kelompok' petani kecil sesuai skala. Di luar pernyataan umum ini, studi Terpercaya melakukan upaya khusus untuk memasukkan indikator terkait petani kecil di antara serangkaian indikator yang diajukan untuk keberlanjutan yurisdiksi. Dari draft 19 indikator yang disajikan dalam lampiran, setidaknya lima indikator secara langsung dan khusus terkait dengan kondisi petani kecil:

- **Produktivitas petani kecil:** perubahan produktivitas rata-rata petani kecil
- **Organisasi petani kecil:** jumlah koperasi yang berfungsi per 1000 petani kecil
- **Dukungan petani kecil:** jumlah program penyuluhan pertanian per 1000 petani kecil
- **Registrasi hukum petani kecil:** proporsi petani dipetakan dan terdaftar
- **Bagian petani kecil:** persentase area perkebunan yang dikelola oleh petani kecil dari total area perkebunan

Indikator-indikator lain yang diajukan juga terkait dengan isu-isu penting bagi petani kecil, seperti penyelesaian konflik lahan dan perkebunan, atau mengenai pengakuan hak-hak adat. Hal ini menunjukkan bahwa definisi yang diajukan tentang keberlanjutan yurisdiksi, sampai dengan taraf tertentu, berkorelasi dengan kondisi umum petani kecil dalam yurisdiksi tersebut.

Lampiran menyajikan indikator-indikator pada empat dimensi keberlanjutan yang sebelumnya digunakan dalam diskusi Terpercaya, yang berkaitan dengan isu lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola.

## Bagaimana koneksi dengan pasar dapat dibangun?

Mampu melacak perkembangan menuju keberlanjutan telah terjadi di tingkat yurisdiksi hanyalah bagian dari informasi yang diperlukan untuk menghubungkan yurisdiksi dengan pembeli dan investor komoditas yang bertanggung jawab. Informasi ini saja tidak akan banyak berguna jika pelaku pasar tidak tahu dari mana sumber mereka berasal, dan jika yurisdiksi tidak tahu ke mana mereka menjual. Itu sebabnya, Terpercaya bekerja sama dengan inisiatif Trase, rantai pasok transparan untuk ekonomi berkelanjutan, yang sedang mengembangkan sistem pelacakan menyeluruh untuk sektor kelapa sawit di Indonesia. Sistem ini akan mampu melacak koneksi rantai pasok yang menghubungkan masing-masing kabupaten di Indonesia yang memproduksi kelapa sawit dengan pasar sasaran (*destination market*) di seluruh dunia. Bagaimana indikator Terpercaya dan data Trase dapat dikombinasikan untuk analisis yang bermanfaat akan diilustrasikan dalam *briefing* di masa mendatang.



Sawah di Bali

◀ Foto: Bertrand Duperrin

# Referensi

---

1 Lihat laman web European Forest Institute tentang Penelitian Terpercaya:

<http://www.euredd.efi.int/publications/tracking-sustainable-palm-oil-and-defining-jurisdictional-sustainability>

2 Sesi diadakan pada 3 Juli dan 6 November 2018.

3 Lihat juga buku panduan yang lebih lengkap untuk kabupaten berkelanjutan – *Making the transition to sustainable agricultural production: a practical guidebook for district governments in Indonesia*:

<http://bit.ly/terpercaya-draftguidebook>

4 Khususnya UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5 Seperti Golden Agri Resources, Pepsico dan Unilever.

6 *Round table* komoditas seperti Round Table for Responsible Soy dan RSPO adalah inisiatif percontohan untuk sertifikasi yurisdiksi. Di Indonesia, Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah merupakan salah satu percontohan untuk sertifikasi yurisdiksi kelapa sawit.

7 Laporan pertemuan Komite Penasihat Terpercaya, 6 November 2018.

**Foto sampul:** buah kelapa sawit segar, Nanang Sujana, CIFOR

Informasi lebih lanjut di [info.terpercaya@efi.int](mailto:info.terpercaya@efi.int)

---

## Pernyataan Penyangkalan

Briefing ini dikembangkan oleh Inovasi Bumi (INOBU) dan European Forest Institute (EFI), dengan dukungan dari Instrumen Kemitraan Uni Eropa (*Partnership Instrument of the European Union*). Isi briefing ini adalah tanggung jawab penulis dan sama sekali tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

Februari 2019.

